

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah Di Smp Negeri 2 Mataram

Sumiati¹, Baiq Eka Septiawindaari²,

¹Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia, sumiatiii1507@gmail.com

²Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia, septiawindari0@gmail.com

Abstrak: Pengelolaan keuangan sekolah merupakan komponen strategis dalam menjamin keberlangsungan dan mutu layanan pendidikan, khususnya pada sekolah negeri yang bergantung pada pendanaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen keuangan di SMP Negeri 2 Mataram yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap bendahara serta staf tata usaha sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di SMP Negeri 2 Mataram telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi pemerintah, ditunjukkan melalui penyusunan RKAS, pengalokasian dana berdasarkan skala prioritas, serta pelaporan keuangan yang mengacu pada petunjuk teknis dana BOS. Prinsip transparansi diwujudkan melalui pelibatan komite sekolah dan pengelolaan arsip keuangan yang sistematis. Kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan pencairan dana BOS yang berdampak pada kelancaran operasional sekolah, sehingga diperlukan kebijakan alternatif berupa pinjaman sementara. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah dinilai memadai, termasuk pengembangan perpustakaan digital sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dan rujukan bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pendanaan pendidikan.

Kata Kunci: Manajemen keuangan sekolah, Dana BOS, Transparansi, Akuntabilitas, Implementasi.

Abstract: School financial management is a strategic component in ensuring the sustainability and quality of educational services, especially in public schools that depend on government funding. This study aims to analyze the implementation of financial management at SMP Negeri 2 Mataram, which includes planning, implementation, recording, reporting, and the application of the principles of transparency and accountability. The research method used is qualitative with data collection techniques through observation and interviews with the treasurer and school administrative staff. The results show that financial management at SMP Negeri 2 Mataram has been carried out in accordance with government regulations, as demonstrated by the preparation of the RKAS (School Budget Plan), the allocation of funds based on priority scales, and financial reporting that refers to the technical guidelines for BOS funds. The principle of transparency is realized through the involvement of the school committee and systematic management of financial archives. The main obstacle faced is the delay in the disbursement of BOS funds, which has an impact on the smooth operation of the school, thus requiring an alternative policy in the form of temporary loans. In addition, the school's facilities and infrastructure are considered adequate, including the development of a digital library as an effort to improve the quality of learning. This study is expected to be used

as evaluation material for schools and a reference for policy makers in improving the effectiveness of education funding.

Keywords: School financial management, BOS funds, transparency, accountability, Implementation

*Correspondence Address:	sumiatiii1507@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	14 Desember 2025	-	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas individu di tengah masyarakat. Sekolah hadir sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar sekaligus mengembangkan potensi peserta didik. Setiap siswa berhak memperoleh layanan pendidikan terbaik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Upaya tersebut tentu tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun material, yang pada akhirnya sangat erat kaitannya dengan aspek pembiayaan. Oleh karena itu, manajemen keuangan menjadi faktor penting dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Manajemen keuangan sekolah dapat dipahami sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya keuangan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap penggunaan dana sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya keuangannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dana yang baik tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga menentukan mutu layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Oleh karena itu, penerapan manajemen keuangan yang tepat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat satuan sekolah. Namun, dalam praktiknya manajemen keuangan sekolah kerap menghadapi berbagai tantangan. Terbatasnya anggaran, meningkatnya biaya operasional, serta kerumitan administrasi sering menjadi hambatan bagi pengelola sekolah. Di samping itu, perubahan kebijakan pendidikan dan ketidakstabilan pendanaan publik juga dapat berdampak pada kondisi keuangan sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan agar sekolah mampu mengelola dana yang tersedia secara bijaksana.

Pada konteks Sekolah Menengah Pertama, manajemen keuangan meliputi perencanaan anggaran, pengalokasian dana, penyimpanan, pengawasan, serta pelaporan. Proses tersebut biasanya didasarkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai pedoman utama dalam menentukan prioritas penggunaan dana. Pengelolaan keuangan harus mengikuti regulasi pemerintah, terutama petunjuk teknis dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjadi sumber pendanaan utama bagi banyak sekolah. Selain itu, keterlibatan komite sekolah dan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memastikan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Namun dalam praktiknya, efektivitas manajemen keuangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pedoman dan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan sekolah dalam mengimplementasikannya secara konsisten. Setiap sekolah memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda, baik dari sisi sumber daya manusia, ketersediaan sarana pendukung, struktur organisasi, maupun kondisi sosial ekonomi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip manajemen keuangan tersebut diterapkan dalam konteks nyata di tingkat satuan pendidikan.

Di sisi lain, kondisi sarana dan prasarana yang cukup memadai menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar pembelajaran, tetapi juga diarahkan pada inovasi jangka panjang. Pembangunan perpustakaan digital, peningkatan fasilitas kegiatan siswa, serta penguatan layanan administrasi merupakan bentuk upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini menegaskan bahwa manajemen keuangan bukan sekadar proses administratif, tetapi turut menentukan arah perkembangan sekolah. Dengan memperhatikan dinamika tersebut, kajian mengenai implementasi manajemen keuangan di SMP Negeri 2 Mataram menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai bagaimana proses pengelolaan keuangan dilakukan oleh bendahara dan tata usaha sebagai aktor utama, tetapi juga mengidentifikasi sejauh mana prinsip akuntabilitas dan transparansi diwujudkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menelaah berbagai kendala yang dihadapi serta peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Jadi bagaimana implementasi manajemen keuangan yang baik yang diterapkan di sekolah SMP Negeri 2 Mataram tersebut dalam menunjang dan memfasilitasi peserta didik dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, yang dapat menunjang perkembangan peserta didik baik ditingkat akademik maupun non-akademik. Hal ini lah yang melatar belakangi kami selaku penulis artikel ini mengangkat tema tentang IMPLEMENTASI MENAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH DI SMP NEGERI 2 MATARAM. Manajemen Keuangan Sekolah mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam manajemen keuangan baik itu perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta perwujudan nilai transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan dan wawancara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami proses pengelolaan keuangan sekolah secara holistik melalui pengamatan langsung serta interaksi dengan informan yang terlibat dalam kegiatan manajerial. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sehingga sesuai untuk mengkaji praktik manajemen secara nyata dalam konteks sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada kegiatan administrasi keuangan sekolah, terutama proses penyusunan RKAS, pengelolaan dana BOS, pencatatan transaksi, serta pelaporan keuangan. Selain itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan bendahara sekolah dan staf tata usaha sebagai informan utama. Wawancara ini bertujuan menggali informasi mengenai prosedur pengelolaan keuangan, peran masing-masing pihak, tantangan yang dihadapi, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan teori-teori manajemen keuangan sekolah. Manajemen keuangan dipahami sebagai proses pengelolaan dana yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pandangan ahli seperti Bafadal (dalam Hermino, 2010) dan Maysarah (2009) juga menjadi rujukan dalam memahami struktur dan prinsip pengelolaan keuangan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Manajemen sekolah adalah proses pengelolaan dan pengadministrasian sekolah yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan nasional maupun tujuan kelembagaan. Manajemen sekolah melibatkan pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan sekolah. Kepala sekolah memegang peran penting sebagai manajer dan pemimpin dalam mengelola komponen sekolah. Depdiknas (2000) menyatakan bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan dalam kepengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pelaporan.

Fungsi utama manajemen keuangan sekolah meliputi perencanaan anggaran tahunan, pengadaan dana, pendistribusian, pelaksanaan anggaran, pembukuan, pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan (Bafadal, 2010). Tujuan dari manajemen keuangan sekolah adalah untuk mengelola dana secara maksimal dan efisien, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meminimalkan risiko penyelewengan dana (Suad Husnan, 2012). Dengan kata lain, manajemen keuangan menjadi instrumen strategis dalam mendukung keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan di sekolah.

A. Bentuk implementasi Manajemen Keuangan Sekolah di SMP Negeri 2 Mataram

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kontekstual dengan bendahara sekolah serta staf tata usaha, implementasi manajemen keuangan di SMP Negeri 2 Mataram menunjukkan bahwa sekolah tersebut telah menjalankan pengelolaan dana pendidikan secara terstruktur dan berpedoman pada regulasi pemerintah. Proses pengelolaan dana dimulai dari penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun setiap awal tahun ajaran sebagai dokumen utama dalam mengatur prioritas pendanaan. Penyusunan RKAS dilakukan melalui identifikasi kebutuhan sekolah, evaluasi capaian pada tahun sebelumnya, serta musyawarah bersama guru dan komite sekolah untuk memastikan bahwa keputusan anggaran mencerminkan kebutuhan riil satuan pendidikan. Dalam implementasinya, sekolah mengacu pada pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Karena itu, penggunaan dana diarahkan pada kegiatan strategis seperti penguatan pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, pemeliharaan fasilitas belajar, serta pendanaan program akademik dan nonakademik. Dana BOS dan bantuan pendidikan lain dialokasikan berdasarkan tingkat urgensi dan kontribusinya terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Praktik manajemen keuangan di SMPN 2 Mataram terlihat melalui empat komponen utama yakni Perencanaan, Pelaksanaan, Pencatatan, dan Pelaporan. Pada tahap pelaksanaan, dana dicairkan sesuai jadwal serta kebutuhan program yang telah disetujui dalam RKAS. Setiap transaksi dicatat oleh bendahara dan disimpan dalam arsip keuangan yang rapi untuk memudahkan audit maupun monitoring internal. Pelaporan dilakukan berdasarkan juknis BOS, sehingga memastikan kesesuaian antara penggunaan dana dan aturan yang berlaku. Monitoring terhadap pelaksanaan program dilakukan oleh tim manajerial dan komite sekolah, yang berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan bahwa penggunaan dana tetap akuntabel dan sesuai prosedur. Melalui mekanisme ini, sekolah dapat meminimalkan potensi penyimpangan serta meningkatkan akurasi pelaporan.

Implementasi manajemen keuangan di SMPN 2 Mataram dapat dijelaskan melalui kombinasi beberapa teori utama. Model pengelolaan lima tahap menurut Bafadal (2008) menjelaskan alur nyata di sekolah dari perencanaan RKAS hingga pelaporan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas (UU 20/2003 Pasal 48) memperkuat alasan mengapa setiap transaksi dicatat dan diaudit. Sementara itu, fungsi manajemen POAC dari G.R. Terry (1972) terlihat dalam bagaimana sekolah merencanakan anggaran, membagi tugas, melaksanakan program, dan melakukan pengawasan. Seluruh proses tersebut juga sejalan

dengan teori pembiayaan pendidikan Nanang Fattah yang menekankan bahwa dana pendidikan harus diarahkan pada pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, mekanisme penggunaan dan pelaporan dana di sekolah sesuai dengan regulasi BOS yang menekankan fleksibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Jadi secara keseluruhan, implementasi manajemen keuangan di SMP Negeri 2 Mataram dapat dikategorikan efektif, karena mekanismenya berjalan sesuai regulasi, melibatkan unsur partisipatif, dan didukung oleh pencatatan serta pelaporan yang tertib. Meskipun demikian, efektivitas ini masih dipengaruhi faktor eksternal, terutama keterlambatan pencairan dana BOS yang berpotensi menghambat jalannya program. Kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen keuangan di tingkat sekolah sangat bergantung pada stabilitas sistem pendanaan pendidikan di tingkat pemerintah.

B. Peran Bendahara Dan Tata Usaha Dalam Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah

Manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan karena menentukan sejauh mana lembaga pendidikan mampu menyediakan layanan belajar yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam perspektif manajemen pendidikan, pengelolaan keuangan tidak sekadar mengatur pemasukan dan pengeluaran, tetapi mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel (Bafadal, 2008). UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 juga menegaskan bahwa setiap dana pendidikan wajib dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Karena itu, keberhasilan manajemen keuangan sekolah sangat ditentukan oleh aktor-aktor internal yang terlibat langsung dalam pengelolaannya, terutama bendahara dan Tata Usaha (TU), yang berfungsi sebagai pusat koordinasi administrasi dan finansial sekolah. Peran keduanya menjadi sangat krusial karena mereka memastikan bahwa setiap rupiah dana pendidikan termasuk dana BOS digunakan sesuai aturan, tepat sasaran, dan mendukung prioritas kebutuhan sekolah.

Peran bendahara dan Tata Usaha (TU) merupakan komponen kunci dalam keberhasilan implementasi manajemen keuangan di SMPN 2 Mataram. Berdasarkan hasil wawancara, bendahara sekolah memegang tanggung jawab strategis dalam seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan dana BOS maupun dana pendidikan lainnya. Hal ini sejalan dengan teori Bafadal (2008) yang menyatakan bahwa manajemen keuangan sekolah mencakup lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban. Pada konteks SMPN 2 Mataram, seluruh tahapan tersebut dijalankan secara sistematis oleh bendahara.

Secara khusus, bendahara bertugas mengelola transaksi keuangan, mencairkan dana, membuat pembukuan harian, menyusun laporan bulanan dan tahunan, serta memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan Juknis BOS dan delapan standar pembiayaan nasional. Bendahara juga menjadi penghubung antara kepala sekolah, komite, TU, dan pihak eksternal. Setiap pengambilan keputusan anggaran dilakukan melalui rapat perencanaan, melibatkan guru, urusan prasarana, dan komite sekolah. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan teori manajemen POAC dari Terry, terutama pada fungsi organizing dan controlling, di mana koordinasi dan pengawasan dilakukan secara kolektif untuk menjaga akuntabilitas.

Tantangan utama yang dihadapi bendahara adalah keterlambatan pencairan dana BOS, sehingga sekolah kerap menalangi kebutuhan mendesak dengan pinjaman sementara. Meskipun demikian, kegiatan operasional tetap berjalan, dan respons siswa terhadap fasilitas yang dihasilkan dari dana BOS menunjukkan dampak positif. Kondisi ini menggambarkan penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana disebutkan dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang BOS, yang menekankan fleksibilitas dan pengelolaan dana berbasis prioritas kebutuhan sekolah. Sementara itu, peran Tata Usaha

(TU) lebih terfokus pada administrasi keuangan, terutama pengelolaan dokumen, pengarsipan bukti pengeluaran, dan penyusunan laporan pendukung. TU memastikan bahwa seluruh transaksi tercatat dan terdokumentasi secara rapi sesuai standar akuntabilitas publik. Peran ini selaras dengan prinsip transparansi yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48, yang menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa TU terlibat dalam identifikasi kebutuhan rutin seperti ATK, listrik, internet, pemeliharaan sarana, serta kebutuhan pelatihan guru. TU juga berperan dalam mengatur prioritas anggaran berdasarkan batas maksimal belanja pegawai (10%) dan pemeliharaan (20%) dari total dana BOS, sesuai ketentuan juknis. Dalam menghadapi kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan, TU bersama bendahara dan kepala sekolah melakukan pergeseran anggaran secara internal, misalnya pada kasus penggantian ring basket yang lebih mendesak daripada pengadaan papan tulis. Mekanisme ini menunjukkan penerapan prinsip efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Lebih jauh, TU membantu pelaporan bulanan ke dinas terkait dan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi sarana prasarana. Walaupun dana BOS terbatas dan tidak dapat mengakomodasi kebutuhan besar seperti perpustakaan digital, TU berkolaborasi dengan komite sekolah dalam menjalin kemitraan pendanaan. Pendekatan kolaboratif ini menguatkan teori Fattah (2009) tentang pentingnya pembiayaan pendidikan yang adaptif dan didukung berbagai pemangku kepentingan untuk menjamin mutu layanan pendidikan.

Jadi dapat dilihat sinergi antara bendahara dan TU di SMPN 2 Mataram memainkan peran penting dalam memastikan ketertiban administrasi, akuntabilitas keuangan, serta efektivitas pemanfaatan dana. Kolaborasi keduanya mencerminkan implementasi manajemen keuangan sekolah yang sesuai prinsip *good governance*, yakni transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi.

C. Mekanisme Proses Manajemen Keuangan Sekolah di SMP Negeri 2 Mataram

Mekanisme pengelolaan keuangan sekolah merupakan fondasi penting dalam memastikan bahwa setiap proses penggunaan dana berjalan terarah, terukur, dan sesuai regulasi. Dalam kerangka teori manajemen keuangan pendidikan, proses pengelolaan dana idealnya mengikuti empat tahap utama perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan yang harus berlangsung secara sistematis dan saling berkaitan. Tahapan ini menjadi indikator kualitas tata kelola sekolah, karena di dalamnya tercermin prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbud tentang Juknis BOS. Untuk itu, memahami bagaimana mekanisme tersebut dijalankan di SMP Negeri 2 Mataram menjadi penting, tidak hanya untuk menilai ketepatan prosedur yang diterapkan, tetapi juga untuk melihat sejauh mana alur pengelolaan dana mampu mendukung operasional pendidikan secara optimal.

1. Perencanaan Anggaran (budgeting)

Proses Perencanaan (budgeting) dalam manajemen keuangan sekolah merujuk pada proses penyusunan anggaran secara sistematis untuk mengkoordinasikan sumber daya keuangan guna mencapai tujuan pendidikan. Ini merupakan tahap awal yang melibatkan identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana, sering kali menghasilkan dokumen seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS). Langkah awal dalam pengelolaan keuangan di SMPN 2 Mataram dimulai dengan proses perencanaan yang disusun secara sistematis dan partisipatif. Perencanaan ini menjadi dasar dari seluruh mekanisme manajemen keuangan sekolah dan dilakukan melalui penyusunan RKAS yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, TU, dan komite. Berdasarkan hasil observasi, sekolah tidak hanya mengidentifikasi kebutuhan rutin seperti listrik,

internet, ATK, dan pemeliharaan fasilitas, tetapi juga menelaah kebutuhan strategis yang menunjang mutu pembelajaran, termasuk pelatihan guru dan pengembangan sarana pembelajaran.

Proses ini sesuai dengan teori manajemen keuangan pendidikan yang menekankan pentingnya analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dalam praktiknya, SMPN 2 Mataram mengacu pada juknis BOS dan delapan standar pendidikan sebagai pedoman utama dalam menentukan alokasi dana, sehingga setiap program yang direncanakan selalu diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Identifikasi kebutuhan berasal dari masukan guru, hasil evaluasi program sebelumnya, serta perhitungan anggaran berbasis jumlah siswa. Dengan demikian, perencanaan keuangan tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa penggunaan dana sekolah selaras dengan kebutuhan aktual, tujuan pendidikan, dan keterbatasan kemampuan anggaran.

2. Pelaksanaan Anggaran (executing)

Pelaksanaan anggaran di sekolah mencakup seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana sesuai pos-pos yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran, seperti BOS, SPP, dan sumber lain. Tujuannya agar pembiayaan program pendidikan berjalan efektif tanpa penyimpangan dari rencana serta tetap transparan dan akuntabel di hadapan warga sekolah dan pihak pengawas. Tahap pelaksanaan anggaran (executing) di SMP Negeri 2 Mataram dilakukan dengan mengacu ketat pada RKAS yang telah disusun dan disahkan di awal tahun ajaran.

Berdasarkan hasil observasi, implementasi anggaran dijalankan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan, terutama pada pengeluaran rutin seperti listrik, internet, ATK, pemeliharaan fasilitas, serta kegiatan pendukung pembelajaran. Bendahara berperan sebagai pelaksana teknis utama yang memastikan setiap transaksi mengikuti juknis BOS dan batasan alokasi anggaran, seperti ketentuan maksimal 10% untuk belanja pegawai dan 20% untuk pemeliharaan. Setiap pengeluaran dilakukan melalui koordinasi dengan kepala sekolah dan disesuaikan dengan urgensi kebutuhan yang muncul selama tahun berjalan.

Fleksibilitas pelaksanaan juga tampak melalui mekanisme pergeseran anggaran, seperti pengalihan dana dari pengadaan papan tulis ke perbaikan ring basket ketika kebutuhan mendesak muncul di tengah tahun. Proses ini menunjukkan bahwa sekolah menerapkan prinsip efisiensi, responsivitas, dan pengendalian internal dalam menjalankan anggaran. Meskipun demikian, pelaksanaan anggaran seringkali dihadapkan pada keterlambatan pencairan dana BOS, sehingga sekolah harus menalangi pengeluaran terlebih dahulu melalui koperasi sebagai strategi keberlanjutan kegiatan operasional. Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran di SMP Negeri 2 Mataram mencerminkan praktik manajerial yang adaptif dan sesuai dengan regulasi, sekaligus menunjukkan kemampuan sekolah dalam mengoptimalkan keterbatasan sumber dana untuk menjaga kelancaran proses pendidikan.

3. Pembukuan/Pencatatan (accounting)

Pembukuan atau pencatatan (accounting) dalam manajemen keuangan sekolah merupakan proses sistematis mencatat, mengklasifikasi, dan merangkum transaksi keuangan harian untuk menghasilkan laporan yang akurat dan transparan. Tahap ini menghubungkan pelaksanaan anggaran dengan pelaporan, memastikan setiap pemasukan dan pengeluaran dapat dilacak sesuai

RKAS atau RAPBS. Pembukuan atau pencatatan keuangan (accounting) di SMP Negeri 2 Mataram dilakukan pada realitasnya dilakukan secara sistematis dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan dalam standar pengelolaan keuangan sekolah.

Pada tahap ini, seluruh transaksi yang terjadi baik penerimaan maupun pengeluaran akan dicatat secara kronologis dalam buku kas umum maupun format digital yang telah distandardisasi oleh sekolah. Setiap transaksi harus disertai bukti sah, seperti nota, kuitansi, atau dokumen pendukung lain yang menjadi dasar verifikasi. Selanjutnya, bendahara menata dokumen-dokumen tersebut berdasarkan jenis belanja, sumber dana, serta waktu penggunaan, sehingga memudahkan proses rekonsiliasi dan pemeriksaan berkala.

Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai instrumen kontrol untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran benar-benar sesuai dengan rencana yang telah disusun pada awal tahun ajaran. Dalam praktiknya, SMP Negeri 2 Mataram menerapkan pencatatan yang tertib dan teratur, sehingga setiap penggunaan dana dapat ditelusuri dengan jelas serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Reporting & Accountability)

Pelaporan adalah penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang memuat ringkasan seluruh penerimaan, pengeluaran, dan saldo dana sekolah dalam satu periode (bulanan, triwulan, tahunan) dibandingkan dengan rencana seperti RKAS/RAPBS. Pertanggungjawaban adalah proses menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, termasuk bukti transaksi, kesesuaian dengan aturan, serta capaian program pendidikan yang dibiayai. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban SMP Negeri 2 Mataram dilaksanakan sebagai bentuk komitmen sekolah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.

Pada tahap ini, bendahara dan tim manajemen keuangan menyusun laporan realisasi anggaran secara periodik, yang memuat rincian penggunaan dana berdasarkan jenis belanja, sumber anggaran, serta kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan pada awal tahun. Laporan tersebut dilengkapi dengan bukti fisik dan dokumen pendukung untuk memudahkan proses verifikasi internal maupun eksternal. Setelah disusun, laporan keuangan disampaikan kepada kepala sekolah untuk dilakukan pemeriksaan serta penilaian kesesuaian antara anggaran dan realisasi. Selain itu, sekolah juga wajib melaporkan penggunaan dana kepada pihak dinas pendidikan maupun lembaga terkait sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Proses pertanggungjawaban ini memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dapat ditelusuri dan dibuktikan secara administratif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan sekolah yang efektif, transparan, dan berintegritas.

Selain penyusunan laporan formal, proses pertanggungjawaban di SMP Negeri 2 Mataram juga mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan secara internal. Bendahara bersama kepala sekolah melakukan pengecekan silang terhadap dokumen pembelanjaan untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi di lapangan. Dalam beberapa kasus, sekolah juga melakukan diskusi terbatas dengan unit terkait seperti wakasek kurikulum atau pengelola program tertentu untuk memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar mendukung kebutuhan prioritas pendidikan.

5. Pengawasan dan Pemeriksaan (Controlling & Auditing)

Pengawasan dan pemeriksaan (controlling & auditing) merupakan tahap pengendalian dalam manajemen keuangan sekolah untuk memastikan seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, berjalan sesuai regulasi, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Tahap ini melibatkan monitoring rutin serta audit komprehensif, baik oleh pihak internal seperti kepala sekolah dan komite, maupun pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah. Dalam praktiknya SMP Negeri 2 Mataram, pengawasan internal dilakukan secara berkala melalui pemeriksaan dokumen pembelanjaan, verifikasi bukti transaksi, serta validasi kesesuaian penggunaan dana dengan RKAS yang telah disahkan.

Kepala sekolah berperan aktif dalam melakukan pengecekan langsung, sementara komite sekolah turut memberikan fungsi kontrol sosial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Proses ini sering disertai rapat evaluasi yang bertujuan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Audit eksternal dilakukan setiap periode tertentu oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat yang menilai kebenaran laporan keuangan, ketertiban administrasi, serta kepatuhan sekolah terhadap juknis dana BOS. Selama observasi, teridentifikasi bahwa SMPN 2 Mataram menunjukkan tingkat kesiapan dokumen yang baik sehingga proses audit dapat berjalan lancar. Sekolah juga menyiapkan arsip digital dan fisik untuk mendukung keterbukaan data bagi auditor.

Secara keseluruhan, tahap pengawasan dan pemeriksaan di SMPN 2 Mataram berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa seluruh rangkaian manajemen keuangan berjalan tertib, transparan, dan sesuai prioritas kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi antara pengawasan internal dan audit eksternal, sekolah dapat menjaga akuntabilitas serta meminimalkan risiko penyimpangan penggunaan dana.

D. Akuntabilitas Dan Transparansi Diwujudkan Dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMP Negeri 2 Mataram

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam manajemen keuangan sekolah yang menegaskan bahwa setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses informasinya oleh pihak yang berkepentingan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48, pengelolaan keuangan pendidikan wajib dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip ini diperkuat oleh teori manajemen keuangan pendidikan yang menyatakan bahwa sekolah harus mengelola dana secara sistematis, terbuka, dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik terjaga (Bafadal, 2010). Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Mataram, kedua prinsip tersebut tampak diimplementasikan melalui mekanisme yang terstruktur di setiap tahapan pengelolaan keuangan.

Dari sisi perencanaan, transparansi diwujudkan melalui penyusunan RKAS yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, wakil kepala sekolah, dan komite. Kegiatan perencanaan dilakukan dengan memetakan kebutuhan prioritas sekolah, mulai dari kegiatan pembelajaran, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan lingkungan sekolah. Proses ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi internal, karena keputusan anggaran tidak ditentukan secara sepihak, tetapi melalui musyawarah yang memastikan setiap usulan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sejak awal. Keterlibatan komite sekolah dalam tahap perencanaan juga memperkuat legitimasi publik terhadap rencana penggunaan dana.

Pada tahap pelaksanaan anggaran, akuntabilitas tampak dari ketertiban bendahara dalam mengikuti juknis BOS serta kebijakan internal sekolah. Setiap pengeluaran dana diverifikasi melalui bukti fisik seperti kwitansi, faktur pembelian, nota resmi, dan dokumen serah terima barang. Observasi menunjukkan bahwa SMPN 2 Mataram menerapkan sistem pencocokan ganda, yaitu memeriksa kesesuaian bukti transaksi dengan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKAS. Hal ini mencerminkan praktik akuntabilitas yang kuat, karena setiap dana yang keluar harus memiliki dasar perencanaan dan bukti nyata penggunaannya.

Sementara itu, transparansi pada tahap pelaksanaan diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada warga sekolah dan komite mengenai kegiatan yang sedang berjalan. Papan informasi BOS dipajang di area sekolah sebagai bentuk publikasi data, termasuk total dana yang diterima dan rincian penggunaannya. Tindakan ini selaras dengan prinsip transparansi publik, yang menuntut sekolah menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses. Pada mekanisme pembukuan dan pencatatan, akuntabilitas semakin diperkuat melalui administrasi yang rapi dan sistematis. Bendahara mencatat seluruh transaksi keuangan dalam buku kas umum, buku pembantu, serta laporan realisasi anggaran. Temuan observasi menunjukkan bahwa SMPN 2 Mataram melakukan pencatatan secara berkala, tidak menumpuk pekerjaan, dan menyiapkan arsip baik dalam bentuk fisik maupun digital. Ketelitian dalam pembukuan ini berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban dan menjadi dasar untuk audit mendatang.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi puncak dari prinsip akuntabilitas. Di SMPN 2 Mataram, laporan keuangan disusun setiap triwulan sesuai ketentuan BOS dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan. Laporan tersebut mencakup rincian penerimaan, pengeluaran, bukti transaksi, hingga kesesuaian penggunaan dana dengan RKAS. Laporan juga dipaparkan dalam forum dengan komite sekolah, menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral kepada masyarakat. Terakhir, dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan, akuntabilitas dan transparansi diuji melalui audit internal dan eksternal. Kepala sekolah dan komite melakukan pengawasan rutin untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Audit eksternal dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat menilai validitas laporan, kebenaran bukti, serta kedisiplinan administrasi. Hasil observasi memperlihatkan bahwa SMPN 2 Mataram selalu mempersiapkan dokumen dengan baik, menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi dan ketaatan pada regulasi.

Jadi secara keseluruhan, implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di SMPN 2 Mataram sudah berjalan cukup baik. Setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pengawasan dilakukan secara terbuka, sistematis, dan penuh pertanggungjawaban. Namun, beberapa tantangan tetap muncul, seperti tingginya beban administrasi yang memerlukan ketelitian, serta keterlambatan dana yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan anggaran. Kendati demikian, komitmen sekolah untuk menjaga kepercayaan publik menjadi faktor penting yang memungkinkan mekanisme pengelolaan keuangan berjalan efektif dan akuntabel.

E. Kendala Serta Tantangan Yang Dihadapi Bendahara Dan Tata Usaha Dalam Implementasi Manajemen Keuangan Di SMP Negeri 2 Mataram

Dalam praktik manajemen keuangan sekolah, bendahara dan Tata Usaha (TU) memiliki posisi strategis karena menjadi garda terdepan dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan anggaran, pencatatan, hingga pelaporan dana pendidikan. Namun, efektivitas pengelolaan keuangan tidak terlepas dari berbagai kendala teknis maupun struktural yang muncul di lapangan. Menurut teori administrasi pendidikan, tantangan manajerial muncul ketika sistem, sumber daya, dan regulasi tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan operasional sekolah (Bafadal, 2010). Berdasarkan hasil observasi di

SMP Negeri 2 Mataram, terdapat beberapa kendala nyata yang memengaruhi kinerja bendahara dan TU dalam menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.

Salah satu kendala paling menonjol adalah keterlambatan pencairan dana BOS, yang berdampak langsung pada pelaksanaan program-program sekolah. Ketika dana tidak cair tepat waktu, bendahara terpaksa melakukan penyesuaian sementara, termasuk mengambil langkah subsidi silang atau bahkan meminjam dana pribadi untuk menjaga keberlangsungan operasional sekolah. Kondisi ini menempatkan bendahara pada posisi dilematis antara tuntutan administrasi dan kebutuhan nyata sekolah, serta berpotensi menimbulkan risiko manajerial jika tidak dikelola secara hati-hati. Situasi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ketepatan waktu alokasi dana merupakan faktor krusial dalam menjaga stabilitas pengelolaan keuangan pendidikan.

Selain itu, kompleksitas regulasi dan juknis BOS juga menjadi tantangan tersendiri. Bendahara harus memastikan seluruh pengeluaran sesuai kategori yang diperbolehkan, sementara kebutuhan sekolah sering kali lebih fleksibel dan berubah-ubah. Observasi menunjukkan bahwa bendahara SMPN 2 Mataram harus terus memperbarui pemahaman terhadap perubahan aturan yang cukup sering terjadi. Kelelahan administratif ini menciptakan potensi kesalahan pencatatan dan keterlambatan penyusunan laporan, terutama saat beban kerja meningkat pada akhir triwulan. Dalam perspektif teori manajemen, kondisi ini menunjukkan pentingnya kapasitas kompetensi sumber daya manusia dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.

Kendala lain muncul pada aspek pencatatan dan pengarsipan, terutama dalam menjaga ketertiban bukti transaksi yang harus lengkap, valid, dan dapat diverifikasi. Berdasarkan observasi, bendahara dan TU sudah memiliki sistem pencatatan yang rapi, namun masih menghadapi tantangan teknis seperti keterbatasan waktu, banyaknya dokumen pendukung, dan kebutuhan untuk menyusun arsip ganda (fisik dan digital). Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga administratif karena menuntut ketelitian tinggi dan konsistensi setiap hari, sementara TU juga menangani urusan non-keuangan lainnya.

Dalam konteks transparansi, bendahara dan TU juga menghadapi tuntutan untuk membuka informasi secara luas kepada komite sekolah, guru, masyarakat, dan pihak eksternal tanpa mengabaikan standar kerahasiaan yang diperlukan. Menyusun informasi dalam bentuk yang mudah dipahami tetapi tetap akurat merupakan tantangan tersendiri, terutama ketika harus menyesuaikan bahasa teknis menjadi format publik. Kondisi ini sesuai dengan teori transparansi publik yang menekankan keseimbangan antara keterbukaan dan akurasi informasi.

Pengawasan internal dan eksternal juga memberikan tekanan tersendiri. Audit dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat membutuhkan kesiapan dokumen yang lengkap dan tidak boleh ada celah administratif. Observasi menunjukkan bahwa SMPN 2 Mataram relatif siap dalam menghadapi audit, namun proses ini menimbulkan beban psikologis bagi bendahara karena takut terdapat kesalahan kecil yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Tantangan ini biasa terjadi dalam sistem yang menuntut akuntabilitas ketat tetapi tidak selalu dibarengi dengan fleksibilitas operasional.

Secara keseluruhan, kendala dan tantangan yang dihadapi bendahara dan TU tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan dana atau teknis administrasi, tetapi juga menyangkut dinamika regulasi, beban kerja, tuntutan akuntabilitas publik, serta kebutuhan sekolah yang terus berkembang. Meskipun demikian, komitmen bendahara dan TU SMPN 2 Mataram untuk tetap menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan, tertib, dan sesuai regulasi menunjukkan bahwa tantangan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi yang baik, ketelitian, serta peningkatan kapasitas manajerial.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Manajemen keuangan di SMP Negeri 2 Mataram pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip utama pengelolaan keuangan pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam teori manajemen keuangan sekolah, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas (UU No. 20/2003 Pasal 48; Bafadal dalam Hermino, 2010). Seluruh proses pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran, pencatatan, pelaporan, hingga pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dan saling berkaitan. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan RKAS yang partisipatif, pelaksanaan anggaran mematuhi juknis BOS dan prioritas kebutuhan pendidikan, pencatatan dilakukan secara sistematis oleh bendahara dan TU, pelaporan disampaikan berkala kepada dinas dan komite, serta pengawasan dilakukan melalui kontrol internal dan audit eksternal. Tahapan-tahapan ini membentuk suatu mekanisme pengelolaan keuangan yang terpadu dan berjalan sesuai standar regulasi pendidikan nasional.

Transparansi dan akuntabilitas terwujud melalui publikasi anggaran, pelaporan rutin, keterlibatan komite, serta dokumentasi keuangan yang rapi. Praktik ini selaras dengan teori Depdiknas (2000) yang menegaskan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan dana merupakan fondasi kepercayaan publik dan pencegahan penyimpangan. Sistem pengarsipan oleh TU memperkuat integritas pelaporan dan memudahkan audit, sementara peran bendahara sebagai pengelola transaksi keuangan membuat proses penggunaan dana berjalan tertib dan terstruktur.

Secara keseluruhan, manajemen keuangan di SMP Negeri 2 Mataram dapat dinilai berjalan cukup baik, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pendidikan. Dengan penguatan kolaborasi, peningkatan kapasitas pengelola keuangan, serta diversifikasi sumber pendanaan pendukung, sekolah berpotensi mencapai tata kelola keuangan yang semakin profesional dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan secara optimal.

REFERENSI | REFERENCE

- Andiawati, E. (2017). Pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/sekolah. In *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1),
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS*. Jakarta:Kementerian Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2017). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2017). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Depdiknas. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Fathiyah, D., Bafadal, I., & Triwiyanto, T. PERSEPSI GURU TENTANG AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH LANJUTAN ATAS (SLTA) NEGERI SE-KOTA PROBOLINGGO.
- Koridin, K., & Pujiyati, W. (2019). Pengaruh Manajemen Keuangan Dan Manajemen Sarana Prasarana Terhadap Mutu Proses Pembelajaran Pada Sekolah Dasar di Wilayah Unit Pengawas Tingkat Dinas (UPTD) Pendidikan Balongan Kabupaten Indramayu. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 5(1), 97-112.

- Mulyasa, E. (2009). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurkolis. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.
- Rahmah, N. (2016). Prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 73-77.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryosubroto, B. (2010). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.